



Policy Paper

Analisis Dampak Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dalam Mendukung Proyek Bendungan Marga Tiga Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung

Erni Vida Aina¹

¹ Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

* **Koresponden:** Erni Vida Aina , erni.vidaaina@yahoo.co.id

CITATION

Erni Virda Aina. (2024). Analisis Dampak Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dalam Mendukung Proyek Bendungan Marga Tiga Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung. Indonesian Journal of Transformation Studies. Volume(1): 1.

ARTICLE INFO

Received: 27 August 2024
Accepted: 24 October 2024
Available online: 9 December 2024

Abstrak : Kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat ekologis, ekonomis maupun sosial. Pengelolaan sumberdaya hutan perlu dilakukan dengan berorientasi ekosistem secara keseluruhan. Salah satu upaya pengelolaan sumber daya hutan adalah rehabilitasi hutan dan lahan. Makalah kebijakan ini menguraikan dampak Rehabilitasi Hutan dan Lahan terhadap ketahanan pangan berkelanjutan yang lokasinya pada salah satu proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Lampung yaitu Bendungan Marga Tiga. Tujuan makalah kebijakan ini adalah menganalisa dampak dari keberhasilan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terhadap ketersediaan air pada sungai Way Sekampung baik kualitasnya, kuantitasnya dan kontinuitasnya. Selain itu, untuk memastikan bahwa kegiatan RHL bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hulu hingga hilir DAS Way Sekampung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan RHL tergantung dengan hasil yang bisa didapat oleh masyarakat melalui skema RHL merencanakan panen. Dari hasil analisa tersebut penulis merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan yaitu: 1) adanya insentif berupa pembayaran jasa lingkungan; 2) mengoptimalkan kegiatan RHL melalui mekanisme RHL Merencanakan Panen; 3) Memaksimalkan kelembagaan yang sudah ada seperti Forum DAS dan TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) Way Seputih Sekampung, sebagai forum koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat melakukan pengelolaan DAS secara terpadu.

Kata kunci: Kelestarian Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, DAS Way Sekampung, Bendungan Marga Tiga

1. Pendahuluan

Provinsi Lampung memiliki daratan seluas 3.528.835 hektar dan diantaranya adalah kawasan hutan negara seluas 1.004.735 hektar atau 28,45% dari luas Provinsi Lampung. Berdasarkan data tutupan lahan, kawasan hutan mengalami kerusakan dan degradasi seluas 535.909 hektar (53,34 %). Berdasarkan fungsinya kawasan hutan di Provinsi Lampung terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini. Sekitar 86% dari kawasan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung sudah terlanjur ada petani penggarap di dalamnya, baik itu kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Hutan dengan tutupan lahan baik (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Konservasi	462.030	386.958	83,75
2	Hutan Lindung	317.615	190.356	59,93
3	Hutan Produksi	225.090	51.493	22,88
JUMLAH		1.004.735	628.807	62,58

Sumber: Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024

Saat ini yang sudah mendapatkan akses legal PS (Perhutanan Sosial) seluas 200.093,73 hektar dengan 348 izin PS. Izin perhutanan sosial tersebut tersebar pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Di kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung terdapat 488.359 hektar sebagai blok pemanfaatan yang di dalamnya terdapat petani penggarap yang membudidayakan tanaman perkebunan dan tanaman semusim.

Tabel 2. Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung s.d. Tahun 2023

NO	SKEMA PS	JUMLAH PERSETUJUAN	HUTAN KONSERVASI (Ha)	HUTAN LINDUNG (Ha)	HUTAN PRODUKSI (Ha)	JUMLAH LUAS (Ha)	JUMLAH ANGGOTA (KK)
1	HKm	213 Unit	-	155.484,52	4.836,07	160.320,59	66.849
2	HTR	13 Unit	-	-	20.159,00	20.159,00	7.521
3	HD	22 Unit	-	2.015,00	-	2.015,00	9.210
4	KK	83 Unit	-	5.979,60	10.884,96	16.864,56	7.442
5	KEMKON	17 Unit	734,58	-	-	734,58	650
JUMLAH		348 Unit	734,58	163.071,12	33.484,74	200.093,73	91.144

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2023

Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Akses legal perhutanan social memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan selama 35 tahun. Kesiambungan program Perhutanan Sosial dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Perhutanan Sosial pun menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dan kemiskinan.

Dengan kondisi kawasan hutan yang sudah banyak manusia di dalamnya, tentu akan mengurangi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi wilayah DAS sebagai catchment area akan berubah fungsi menjadi lahan yang terbuka dan beralih fungsi sebagai lahan pertanian. Berdasarkan perhitungan BPDAS Way Seputih Way Sekampung data kekritisn lahan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kekritisan Lahan di Provinsi Lampung

No	Kelas Kekritisan Lahan	Luas (hektar)	%	Keterangan
1	Sangat Kritis	22.882	0,68	Prioritas I
2	Kritis	378.067	11,27	Prioritas I
3	Agak Kritis	687.716	20,51	Prioritas II
4	Potensial Kritis	1.288.125	38,41	Prioritas III
5	Tidak Kritis	976.536	29,12	Prioritas III
	Jumlah	3.353.326	100	

Sumber: Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Sekampung

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Sebaran spasial lahan dengan kelas sangat kritis, kritis dan agak kritis sebagian besar terdapat di daerah hulu yang notabene adalah kawasan hutan lindung dan sebagian hutan konservasi. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air bagi waduk dan bendung yang mengairi lahan irigasi persawahan di wilayah hilir.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah salah satu upaya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencapai 2 (dua) target Indikator Kinerja Utama yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Lampung yaitu Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. RHL merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Visi Provinsi Lampung 2019-2024 adalah “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” dan salah satu Misi-nya yaitu “Mewujudkan Keseimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan Pembangunan” (Misi ke-6). Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam janji Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang ke-14 yaitu “Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat”. Janji tersebut dapat diwujudkan dengan cara:

1. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan;
2. Mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat;
3. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan.

DAS termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pembagian Daerah Aliran Sungai berdasarkan fungsi Hulu, Tengah dan Hilir yaitu: Bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. Bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Bendungan Marga Tiga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung. Bendungan Marga Tiga dibangun sebagai upaya untuk mendukung program ketahanan pangan dan air nasional. Pembangunan bendungan Marga Tiga merupakan satu kesatuan dari pemanfaatan aliran air sungai Way Sekampung dari hulu hingga hilir. Dari aspek manfaat adanya bendungan Marga Tiga adalah untuk menjamin tersedianya air dalam mendukung ketahanan

pangan khususnya pertanian. Selain untuk irigasi, bendungan ini bertujuan untuk mereduksi banjir dan juga pariwisata di Kabupaten Lampung Timur.

Ketahanan pangan terkait erat dengan ketersediaan air. Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan kegiatan yang mendukung tersedianya air dari wilayah hulu hingga hilir. Bendungan Margatiga membendung aliran Sungai Way Sekampung di daerah hilir untuk dimanfaatkan sebagai pengairan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Lampung seluas 16.588 hektar terdiri dari DI Jabung kiri 5.638 hektare dan potensi DI Jabung kanan 10.950 hektar. Bendungan ini berlokasi di Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Bendungan ini terintegrasi dengan dua bendungan lainnya yang berada wilayah hulu, yaitu Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu dan Bendungan Batutege di Kabupaten Tanggamus.

Ketersediaan air ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) ke 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”, lebih khusus dalam target SDGs 6.6 yaitu pada tahun 2030 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau. Salah satu upaya melindungi dan merestorasi ekosistem adalah melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Untuk itu perlu upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), yaitu upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Dalam policy paper ini penulis akan menyajikan dampak dari kegiatan RHL terhadap kelangsungan sumber daya air pada wilayah DAS Way Sekampung. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa DAS Way Sekampung dan sub sub DAS termasuk sungai sungai yang ada di wilayah tersebut akan mengalir ke Bendungan Marga Tiga. Dengan demikian tersedianya air pada bendungan marga tiga sangat tergantung dengan keberhasilan kegiatan RHL di bagian hulu DAS nya yaitu di wilayah catchment area batu tegi yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Banyaknya masyarakat yang tinggal atau bermukim di dalam atau di sekitar kawasan hutan dengan mata pencaharian yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dapat mempengaruhi ekosistem hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting. Bukan hanya dalam penyediaan lapangan kerja dan akses pengelolaan hutan tetapi juga dalam upaya menurunkan angka degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisa dampak dari keberhasilan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terhadap ketersediaan air pada sungai Way Sekampung baik kualitasnya, kuantitasnya dan juga kontinuitasnya. Selain itu untuk memastikan bahwa kegiatan RHL bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hulu hingga hilir DAS Way Sekampung. Beberapa manfaat dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memberikan keuntungan kepada masyarakat khususnya petani hutan sebagai pelaku kegiatan. Petani diuntungkan dengan memanen hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berupa hasil hutan bukan kayu seperti buah buahan, getah, dan rempah.
- b. Terjaganya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air sungai Way Sekampung yang mengalir ke Bendungan Marga Tiga yang merupakan lumbung air baku bagi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
- c. Sebagai bahan masukan kepada pembuat kebijakan (policy maker) dan stakeholders lainnya, berkaitan dengan kebijakan mekanisme insentif berupa imbal jasa lingkungan sebagai bentuk pengelolaan das terpadu sehingga dapat menjaga kelestarian sumberdaya air dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (sustainable natural resources).

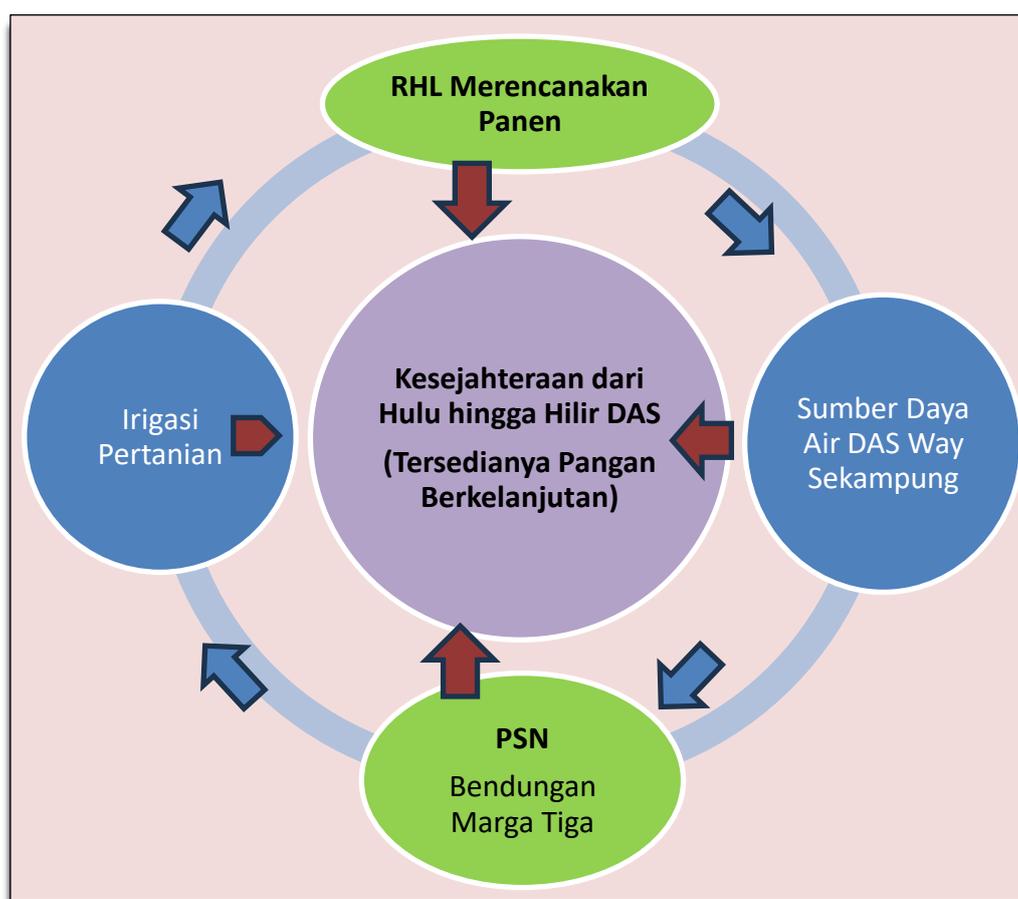
Dalam policy paper ini yang menjadi kerangka konsepnya adalah seberapa pentingnya keberhasilan RHL terhadap proyek strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Proyek strategis nasional yang penulis pilih adalah bendungan Marga Tiga yang terintegrasi dengan bendungan di bagian hulu yaitu bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu dan Bendungan Batutege di Kabupaten Tanggamus.

DAS Way Sekampung merupakan DAS yang sangat penting bagi kehidupan. Secara administratif DAS Way Sekampung berada di 9 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. DAS Way Sekampung terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian hulu, tengah dan hilir. Bagian hulu meliputi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten

Pringsewu. Bagian tengah meliputi Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah. Bagian hilir meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

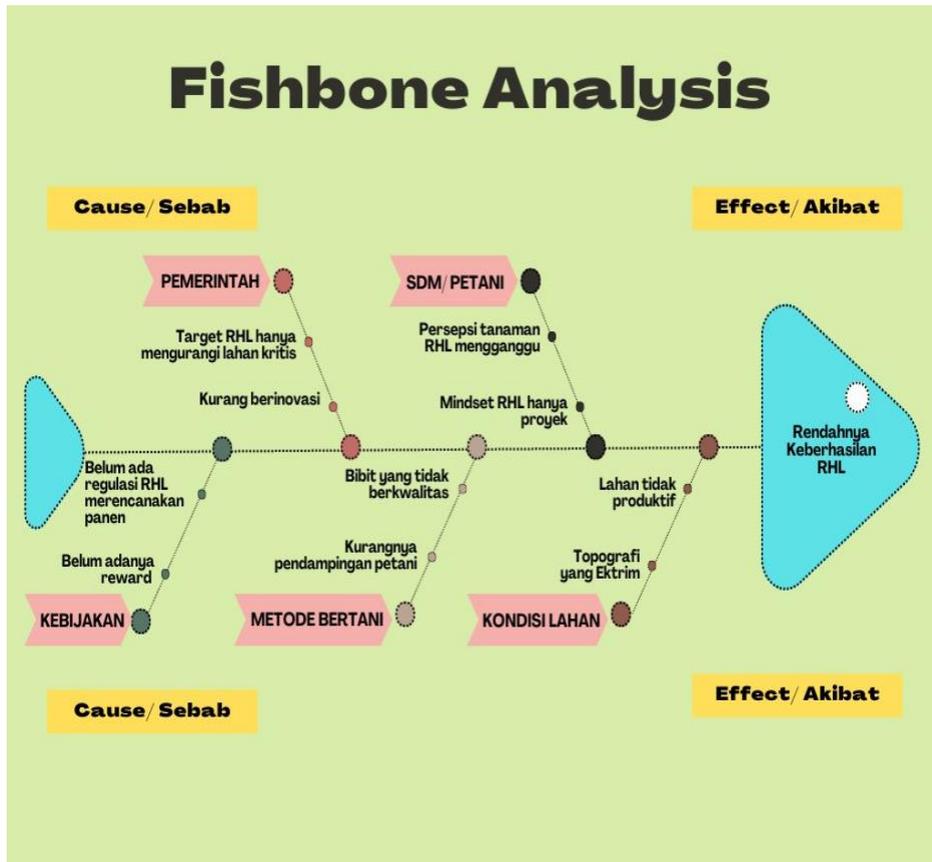
Penulis ingin memetakan dampak RHL terhadap ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengetahui manfaat RHL itu sendiri terhadap kesejahteraan masyarakat dari hulu hingga hilir DAS. Dampak RHL bukan hanya dilihat dari sisi konservasi nya akan tetapi juga dari sisi ekonomi. Selain itu RHL juga berdampak akan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Harapan jangka panjangnya adalah akan adanya insentif imbal jasa lingkungan bagi masyarakat dibagian hulu sebagai pelaku konservasi tanah dan air di bagaian hulu sebagai catment area dari DAS Way Sekampung. Hal ini tentu akan dapat diwujudkan apabila ada kesepakatan dari semua sektor dan multi stakeholders terkait.



Gambar 1. Korelasi RHL dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Baik buruknya kondisi DAS tentu saja dipengaruhi oleh keberhasilan dari RHL. Dengan demikian RHL sangat menentukan kondisi DAS dan sub DAS termasuk juga air yang mengalir sungai dari hulu hingga hilir baik dari kualitasnya, kuantitasnya dan juga kontinuitasnya. Namun dari hasil pengamatan dan analisa penulis bahwa selama ini kegiatan RHL belum begitu berhasil terutama dilihat dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih berpikir bahwa RHL hanya sekedar proyek dan tidak menguntungkan bagi petani. Untuk mengetahui penyebab dari kurangnya keberhasilan kegiatan RHL, penulis menggunakan alat analisis akar masalah yaitu fishbone analisis.



Gambar 2. Analisis Akar Masalah

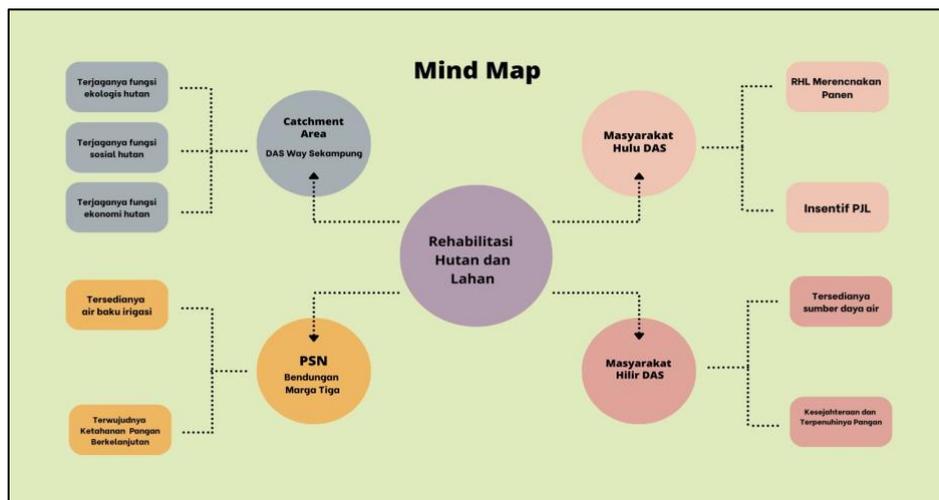
Untuk menangani permasalahan dari tingkat keberhasilan kegiatan RHL diperlukan analisa faktor eksternal dan internal sehingga akan dapat ditemukan strategi yang paling baik yang merupakan solusi untuk mengatasi masalah. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal Strengths dan Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Identifikasi faktor internal dan eksternal dapat disajikan dalam matrik SWOT berikut:



Gambar 3. Matrik SWOT

Dari matrik SWOT dapat diambil strateginya yaitu menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan pemerintah adalah adanya sumber daya berupa lahan (hutan) dan juga petani, adanya program yaitu RHL dan Perhutanan Sosial, serta kearifan lokal. Sedangkan peluangnya adalah adanya kerjasama dengan sektor swasta, animo masyarakat dalam menanam tanaman MPTS dan juga dukungan pemerintah desa. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada maka diharapkan bahwa RHL akan berhasil mengembalikan fungsi hutan secara ekologis sekaligus mendapatkan fungsi ekonomi dan sosial.

Dari uraian mulai dari penentuan akar masalah dan penentuan strategi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan analisis SWOT, maka penulis menuangkannya dalam kerangka pikir secara utuh. Kerangka pikir ini berisikan peta manfaat dan dampak dari keberhasilan kegiatan RHL.



Gambar 5. Alur pikir Dampak RHL terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Hutan menyediakan pelayanan ekosistem yang mendasar bagi kehidupan dan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan, khususnya mereka yang miskin. Hutan melindungi daerah tangkapan yang menyediakan air bersih, mengurangi kerusakan akibat banjir, menstabilkan lereng dan mencegah longsor. Di daerah yang lebih kering, hutan melindungi mata air, dan hutan pegunungan mengikat air yang kemudian mengalir ke sungai yang menghidupi daerah rendah.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Hubungan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kesejahteraan masyarakat sangat erat, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat menjadi suatu masalah yang besar jika pengelolaannya tidak terkoordinasi dengan baik.

Hutan dan kehutanan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut melalui upaya pengentasan kemiskinan dengan menaikkan pendapatan, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga serta memperbaiki kelestarian sumberdaya hutan pada khususnya dan sumber daya alam pada umumnya.

Policy paper ini berjudul Analisis Dampak Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dalam Mendukung Proyek Bendungan Marga Tiga Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung. Tulisan ini memuat seberapa pengaruh kegiatan RHL terhadap ketersediaan air untuk pertanian di Provinsi Lampung. Air merupakan unsur utama dalam kegiatan pertanian. Tanpa air bisa dipastikan pertanian tidak akan berhasil. Ketersediaan air yang sebagian besar dari air sungai sangat tergantung dari kondisi hutan di bagian hulu sungai. Hutan merupakan catchment area dari DAS yang dalam ini adalah DAS Way Sekampung. Keberadaan hutan sebagai catchment area mampu menambah pasokan air tanah, yang akan dikeluarkan melalui mata air. Air yang keluar dari mata air digunakan untuk menunjang pembangunan ekonomi, salah satunya untuk irigasi pertanian.

Pengelolaan DAS Way Sekampung sebagai sumberdaya air sangat memerlukan adanya sistem pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan DAS secara terpadu bisa melalui lembaga atau organisasi yang sudah ada

seperti Forum DAS dan TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) Way Seputih Way Sekampung. Pengelolaan DAS secara terpadu ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sumber daya air baik kualitas, kuantitas dan juga kontinuitasnya. Untuk itu diperlukan strategi dalam pengelolaan DAS yaitu dengan mekanisme insentif pembayaran jasa lingkungan serta memaksimalkan kelembagaan pengelolaan DAS. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi DAS Way Sekampung dibagian hulu akan terjaga kondisinya sehingga kondisi sumber daya air akan terpenuhi hingga kebagian hilir DAS. Dengan tersedianya sumber daya air maka pertanian di bagian hilir akan terjamin produktivitasnya. Di bagian hulu DAS masyarakat dapat memanen dari tanaman RHL. Dengan begitu ketahanan pangan berkelanjutan akan terwujud dan kesejahteraan masyarakat di hulu dan hilir DAS Way Sekampung akan meningkat.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “tujuan dari penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan”.

Keberhasilan dari suatu program maupun kegiatan sangat sangat tergantung dari perencanaan yang matang. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030 memiliki visi Tata Kelola Kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat, dan disebutkan pula dalam salah satu tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan. Program Perhutanan Sosial mencoba mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Luasnya kawasan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat menunjukkan lemahnya negara dari sisi pengamanan hutan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan hutan, kecuali dengan melibatkan masyarakat pada pengelolaan hutan. Sebagai upaya legalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial.

Perhutanan Sosial digulirkan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan. Perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional untuk mengelola hutan secara lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui agroforestri, di mana masyarakat memperoleh pendapatan dari hasil hutan (kayu), pertanian tumpang sari, dan perkebunan.

Dalam konteks Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Perhutanan Sosial dipercaya akan mampu menjawab pemerataan ekonomi melalui pemberian akses legal kelola kawasan hutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program Perhutanan Sosial digulirkan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat kebijakan dan strategi percepatan Perhutanan Sosial tidak hanya pada percepatan pemberian akses kelola, tetapi juga pada kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan, agar pengelolaan hutan mengikuti kaidah *good forest governance*, sehingga proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Presiden tersebut bendungan Marga Tiga merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berada di Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Lampung.

Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi DAS sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an melalui Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air (PPHTA), melalui Inpres Penghijauan dan Reboisasi, kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Tujuan dari upaya-upaya tersebut pada dasarnya adalah untuk mewujudkan perbaikan lingkungan seperti penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan secara terpadu, transparan dan partisipatif, sehingga sumberdaya hutan dan lahan berfungsi optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, serta memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan perlunya pengelolaan DAS secara terpadu yang harus melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu DAS.

Faktor penting yang menentukan keberhasilan RHL adalah partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program RHL. Keikutsertaan masyarakat yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan kawasan hutan lebih ditekankan agar kelompok masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga hutan.

2. Metode

Metode analisis yang digunakan dalam policy paper ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Ini adalah teknik mengidentifikasi pola dan tautan dengan memanfaatkan data terkini dan historis. Karena mengidentifikasi pola dan asosiasi tanpa melangkah lebih jauh, ini sering disebut sebagai analisis data paling dasar.

Data yang dikumpulkan dalam penulisan policy paper ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah DAS Way Sekampung selama 5 tahun terakhir. Data sekunder berupa data luas lahan pertanian di wilayah DAS Way Sekampung, data produksi pertanian (tanaman padi).

Data primer berupa data Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah DAS Way Sekampung selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, baik yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Penulis memilih dimulai tahun 2019 karena pada tahun 2019 baru dimulainya RHL dengan menggunakan bibit produktif yang sebelumnya hanya bibit kayu kayuan saja. Selanjutnya data diolah untuk disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Peta dibuat dengan cara mengoverlay data RHL dalam bentuk shp (shapefile) dan data DAS di Provinsi Lampung yang juga dalam bentuk shp (shapefile). Pembuatan peta dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcGis 10.4.

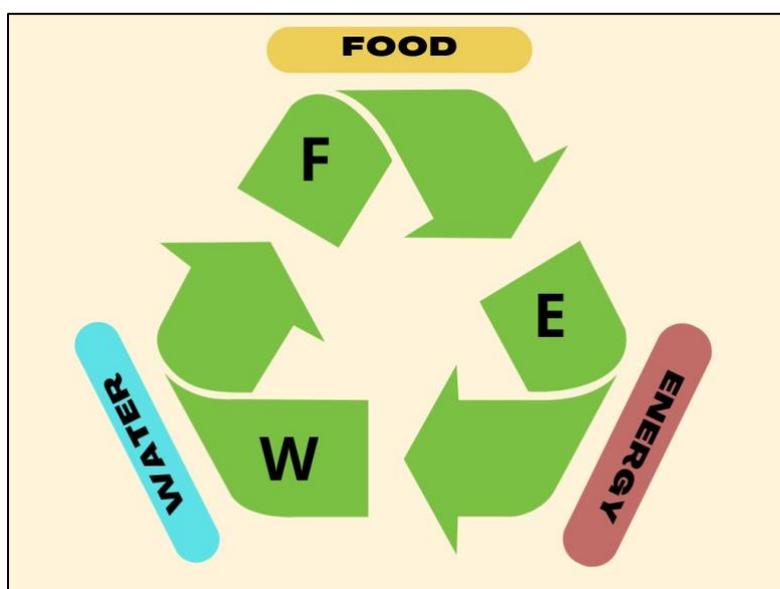
3. Hasil

DAS Way Sekampung merupakan salah satu 15 DAS prioritas yang ada di Provinsi Lampung dari 108 DAS kritis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Status DAS Sekampung saat ini adalah DAS yang perlu "dipulihkan" daya dukungnya, dimana kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Luas DAS Sekampung adalah 484.191,80 Ha, melewati 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, mempunyai 7 Sub DAS yaitu Way Sekampung Hulu, Way Bulok,

Way Semah, Way Tugubalak, Way Kandis, Way Katibung, dan Way Sekampung Hilir. DAS yang terluas berturut turut adalah Way Sekampung Hilir (181.832,70 ha) atau 37,6%. Way Bulok (87.670,00 ha) atau 18,1%, dan Way Sekampung Hulu (82.201,41ha) atau 17,0%.

Upaya konservasi tanah dan air dibagian hulu DAS melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. RHL merupakan upaya konservasi secara vegetatif yaitu dengan penanaman pohon. Sedangkan upaya konservasi tanah dan air secara sipil teknis adalah dibangunnya bendungan marga tiga. Upaya upaya konservasi tersebut bertujuan untuk mengatur tata air. Dengan begitu ketersediaan air akan terjaga sepanjang tahun. Hal ini akan menjamin keberhasilan dan produktivitas sektor pertanian.

Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air bukanlah masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Sebaliknya, mereka terkait sangat erat satu sama lain, yang sering diungkapkan belakangan sebagai “food-energy water” (FEW) nexus. Sebagai contoh, program ketahanan pangan akan membutuhkan air dalam jumlah besar, yang dapat disiapkan antara lain melalui pembangunan jaringan irigasi. Demikian pula program peningkatan ketahanan energi mungkin membutuhkan air dalam skala besar untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, atau membutuhkan biomass maupun komoditas pertanian lainnya yang akan memiliki pengaruh pada pencapaian program ketahanan pangan.



Gambar 5. Nexus Air, Pangan, Energi

Ketahanan air penting untuk dapat dicapai karena memiliki implikasi terhadap pencapaian ketahanan sektor-sektor lainnya, seperti energi dan pangan, secara nasional. Penilaian ketahanan air dengan menggunakan perspektif Ilmu Lingkungan akan memberikan penilaian yang komprehensif antara keterkaitan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari variabel-variabel terkait sumber daya air. Tercapainya ketahanan air akan mendukung tercapainya ketahanan energi dan pangan dalam kerangka besar FEW Nexus.

Kondisi ekosistem hulu DAS Way Sekampung sangat tergantung bagaimana masyarakat sekitar memperlakukan lingkungannya. Hal ini tentu saja ditentukan seberapa tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri terhadap lahan yang ada di hulu DAS untuk menopang kehidupannya. Kebutuhan bisa berupa kegiatan pertanian, permukiman, rekreasi dan kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekosistemnya apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi.

Salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan konservasi adalah dengan menerapkan instrumen ekonomi yaitu Pembayaran Jasa Lingkungan. Konsep yang ditawarkan pada program PJJ adalah masyarakat dibagian hulu DAS Way Sekampung sebagai penyedia jasa lingkungan (provider) akan diberi dana kompensasi agar mereka bersedia melakukan

upaya konservasi hutan di bagian hulu DAS Way Sekampung. Sedangkan pemanfaat jasa lingkungan (buyer) akan membayar dana kompensasi tersebut kepada masyarakat dibagian hulu DAS.

Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. Pada kabupaten/ kota yang ada terdapat lahan pertanian berupa sawah. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan lahan sawah yang paling luas. Selain Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat lahan sawah yang luas dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Tabel 5. Luas Sawah di Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Luas Baku Sawah (Ha) Kepmen ATR/ BPN No. 686 Tahun 2019
Lampung Barat	10.464,65
Tanggamus	16.842,67
Lampung Selatan	38.687,99
Lampung Timur	58.592,13
Lampung Tengah	79.664,17
Lampung Utara	14.972,92
Way Kanan	14.384,18
Tulang Bawang	51.094,78
Pesawaran	13.304,54
Pringsewu	13.928,26
Mesuji	30.611,07
Tulang Bawang Barat	6.996,64
Pesisir Barat	8.587,70
Bandar Lampung	619,32
Metro	2.947,90
Provinsi Lampung	361.698,92
Wilayah Way Sekampung	235.051,63
Persentase	64,99

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Dari tabel 4 diatas bahwa luas sawah di wilayah DAS Way Sekampung sangat dominan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. Sebesar 64,99 persen lahan sawah di Provinsi Lampung berada pada wilayah DAS Way Sekampung. Dengan demikian ketersediaan air untuk pertanian ini adalah suatu hal yang sangat penting. Untuk itu diperlukan komitmen bersama sehingga ketersediaan air dapat terjaga.

3.1. Peningkatan Produksi Pertanian

Pada tahun 2022 Produksi padi Nasional mencapai 54,75 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) dan produksi padi Provinsi Lampung mencapai 2,96 juta ton sehingga berkontribusi sebesar 4,91% terhadap kebutuhan pangan Nasional. Dari angka tersebut membuat Provinsi Lampung menjadi urutan ke-5 (lima) Nasional. Di Provinsi Lampung Kabupaten penghasil padi tertinggi pada Tahun 2022 adalah Kabupaten Lampung Tengah, disusul oleh Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga Kabupaten tersebut berada pada wilayah DAS Way Sekampung. Capaian produksi padi ini tentu saja karena tersedianya air untuk pertanian.

Tabel 6. Produksi Padi dalam GKG (Gabah Kering Giling) di Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Produksi (Ton) GKG		
	2020	2021	2022
Lampung Barat	57093.19	60665.89	62802.09
Tanggamus	148158.63	123414.48	128674.92
Lampung Selatan	311668.77	330325.73	339941.87
Lampung Timur	459300.61	397374.49	449294.90
Lampung Tengah	599111.20	489447.65	566601.47
Lampung Utara	75751.91	74260.22	63452.76
Way Kanan	78824.55	82234.55	100985.27
Tulang Bawang	215987.34	232508.52	268323.74
Pesawaran	113206.52	113402.71	130558.89
Pringsewu	130867.36	122185.57	137096.53
Mesuji	325509.23	336767.80	296934.72
Tulang Bawang Barat	30361.02	33802.34	50700.33
Pesisir Barat	60273.60	62295.74	60772.93
Bandar Lampung	2506.64	2561.57	2721.97
Metro	41669.07	24205.52	29297.35
Provinsi Lampung	2650289.64	2485452.78	2688159.74

Sumber: Data BPS 2023

3.2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan

Masalah kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan kerusakan hutan merupakan isu penting yang terjadi di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan yang semakin meningkat, sementara luas lahan relatif tetap menyebabkan masyarakat terpaksa mengalihfungsikan kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian dan perkebunan. Desakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan menyebabkan mereka melakukan pembukaan kawasan hutan. Masyarakat tidak bisa dieliminasi karena pada kenyataannya ketergantungan masyarakat akan hutan masih relatif sangat tinggi. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan harus win-win solutions yaitu membangun keduanya secara proporsional. Dengan demikian, kegiatan RHL harus terintegrasi dengan upaya membangun masyarakat di sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

RHL merupakan isu strategis yang harus diperhitungkan dalam pencapaian visi Dinas Kehutanan. Isu strategis adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian atau event yang sedang terjadi pada saat ini dan mengambil perhatian banyak pihak. Isu tersebut dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan sangat berpengaruh terhadap jalannya kehidupan kedepannya. Bagi organisasi, isu strategis perlu disikapi dengan penyiapan langkah-langkah strategis yang akan diambil kedepannya dalam mewujudkan visi organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan RHL keberhasilan tidak hanya diukur dari indikator keberhasilan teknis silvikultur (jumlah pohon/ha), tetapi harus sampai pada evaluasi dampak serta multiplier effect yang diakibatkan. Kegiatan RHL diharapkan tidak hanya dititikberatkan kepada kegiatan menanam pohon semata namun juga dapat membangun hutan secara menyeluruh baik dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi. RHL “Merencanakan Panen”, adalah slogan yang ditetapkan untuk menjawab permasalahan dan tantangan kegagalan RHL selama ini. Bibit yang dipilih adalah jenis MPTS (Multi Purpose Trees Species) berupa bibit produktif yang diminati masyarakat.

3.3. Keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan ditentukan oleh keberhasilannya dalam memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Gagal dalam pemecahan masalah ekonomi masyarakat, akan gagal pula dalam upaya pengelolaan hutan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan RHL saat ini. Melalui kegiatan RHL yang bersifat padat karya diharapkan disamping untuk mencapai tujuan pulihnya kawasan hutan lindung juga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Tantangan sesungguhnya dari kegiatan RHL adalah membangun perilaku positif masyarakat dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan inisiatif. Ketika masyarakat sudah mempunyai keempat aspek tersebut dalam partisipasi kegiatan RHL maka keberhasilan teknis RHL akan lebih mudah tercapai. Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap kegiatan RHL harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, jangan sampai masyarakat menganggap RHL adalah program pemerintah yang hanya menguntungkan pemerintah. RHL harus tumbuh dari keinginan masyarakat, proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sampai hasil tanamannya menjadi milik petani penggarapnya.

Faktor kesepahaman mempunyai korelasi positif yang sangat signifikan dengan tingkat keeratn hubungan yang kuat dengan kemandirian masyarakat. Kesepahaman dalam konteks ini adalah upaya sosialisasi yang dilakukan terkait kegiatan RHL dan seberapa jauh masyarakat memahaminya. Hal ini berarti bahwa semakin masyarakat memahami mengenai kegiatan di mana mereka terlibat di dalamnya, maka dapat diharapkan semakin besar pula partisipasi serta kemandirian mereka. Selanjutnya, untuk mendorong perilaku positif masyarakat, maka dampak RHL secara ekologis, ekonomis dan sosial harus menjadi prioritas.

Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh dua pihak pelaku pembangunan yaitu pemerintah dan swasta. Pendekatan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana kedua pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha/layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sedangkan sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dari multi pihak. *Public Private Partnership* adalah skema kerja sama yang saling menguntungkan antara swasta dan pemerintah. PPP merupakan investasi, oleh karenanya pihak swasta berhak mendapatkan pengembalian investasi baik berupa tarif (*user charges*) atau *availability payment* (*government pays*). Pemerintah pun dapat memberikan dukungan pemerintah (*government support*), dalam hal proyek memiliki nilai kemanfaatan tinggi bagi masyarakat, namun tidak memiliki kelayakan finansial. Pada kegiatan RHL Merencanakan Panen, pihak swasta berperan dalam pemodal (*financier*) seperti penyedia bibit unggul, pupuk dan lainnya. Selain itu pihak swasta juga bisa mendukung proses hilirisasi pasca panen seperti pemasaran sehingga petani RHL sudah mendapatkan jaminan dalam pemasaran hasil tanamannya. Sedangkan pemerintah dapat memberikan dukungan berupa regulasi kerjasama antara swasta dan petani sehingga ada kesepakatan antara keduanya.

Untuk mendukung pembangunan di sektor publik tentu saja diperlukan marketing sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produknya. Marketing Sektor Publik, atau pemasaran di lingkungan organisasi pemerintah adalah suatu pendekatan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Produk organisasi tersebut dapat berupa barang, layanan, kebijakan, program, maupun kegiatan. Produk inilah yang harus diproduksi dengan pendekatan marketing yakni dengan memahami kebutuhan dan tuntutan pelanggan (*customer*). Salah satu produk Dinas kehutanan Provinsi Lampung berupa kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) Merencanakan Panen.

Berhasilnya kegiatan RHL secara menyeluruh akan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sebagaimana kita ketahui bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ada beberapa TPB yang dapat dicapai apabila kegiatan RHL berhasil yaitu TPB (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (13)

Penanganan Perubahan Iklim; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

4. Rekomendasi

1. Keberhasilan kegiatan RHL, pada umumnya dicirikan oleh keterlibatan masyarakat setempat secara aktif serta intervensi teknis yang digunakan dapat mengatasi penyebab ekologis degradasi hutan. Pada akhirnya, kombinasi pencapaian tujuan ekologis, ekonomi dan sosial budaya merupakan satu keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL. Disinilah pentingnya pembuatan kebijakan yang terkait dengan upaya keberhasilan pelaksanaan RHL yang bersifat *win win solution* bagi pemerintah sebagai perumus kebijakan dan bagi masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Optimalisasi pemanfaatan lahan hutan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui kegiatan RHL “Merencanakan Panen”.
2. Memastikan kelayakan ekonomi kegiatan rehabilitasi. Untuk menjamin adanya manfaat ekonomi jangka panjang, berbagai aspek ekonomi agar dimasukkan dalam rancangan kegiatan antara lain: mekanisme insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat; strategi pemasaran hasil; analisis usaha; dan dampak ekonomi perlu dijamin pada kelompok masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menciptakan insentif yang tepat bagi masyarakat sangat penting disamping strategi dan perencanaan yang juga merupakan kunci dalam keberhasilan. Untuk itu diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang insentif bagi masyarakat di bagian hulu sungai sebagai pelaku penyelamat ekosistem untuk ketersediaan air bagi masyarakat di bagian hilir. Insentif berupa pembayaran jasa lingkungan baik berupa finansial maupun non finansial.
3. Memaksimalkan kelembagaan yang sudah ada seperti Forum DAS dan TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) Way Seputih Sekampung, sebagai forum koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat melakukan pengelolaan DAS secara terpadu.

5. Kesimpulan

Perhutanan sosial yang ada saat ini cenderung dikelola dengan pola tanam monokultur (kopi saja, jagung saja, singkong saja) dan tidak memperhatikan kaedah konservasi serta kelestarian fungsi hutan. Hal ini lambat laun akan mengakibatkan kondisi lahan menjadi miskin hara, akibatnya produktivitas tanaman budidaya menjadi turun dengan kata lain petani dan lahan saling memiskinkan. Optimalisasi pemanfaatan lahan secara bijak dengan menerapkan pola agroforestry untuk diversifikasi tanaman bernilai ekonomi dalam rangka diversifikasi pendapatan petani. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mengembangkan sistem budidaya yang ekonomis, ekologis, dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan RHL “Merencanakan Panen”. Dari sisi ekologis kegiatan RHL sebagai upaya konservasi diharapkan dapat menjamin ketersediaan air di wilayah DAS Way Sekampung baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Tersedianya air dari hulu hingga hilir tentu akan dapat mendukung kinerja salah satu proyek strategis nasional yaitu bendungan Marga Tiga.

Upaya konservasi melalui kegiatan RHL tentu saja sangat tergantung dengan masyarakat dibagian hulu. Tersedianya air yang mendukung ketahanan pangan dibagian hilir sangat tergantung dengan masyarakat di bagian hulu. Untuk itu sudah selayaknya ada reward bagi masyarakat dibagian hulu melalui mekanisme insentif pembayaran jasa lingkungan berupa imbal jasa baik finansial maupun non finansial. Tentu saja untuk mewujudkan mekanisme ini memerlukan perencanaan yang matang dan juga komitmen dari semua pihak terkait.

Kontribusi penulis: Penulis berkontribusi pada seluruh bagian artikel penelitian baik dalam konseptualisasi, metodologi, validasi, analisis formal, dan penulisan.

Acknowledgments: Dukungan berasal dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Konflik kepentingan : Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan policy paper ini.

Referensi

Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Sekampung Tahun 2017.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi*. Diakses pada 28 November 2023, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>

Dewi, Indah Novita. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial. *Buletin Eboni* 15 (2).

Eva Wollenberg, dkk, Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia?, *Governance Brief*, Nomor 4, 2004.

Faisol. Hanif. Dkk. (2020). Status Hutan dan Kehutanan Indonesia. *Perhutanan Sosial: Lumbung Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. KLHK.

Fatimah. Siti. (2016). Analisis Kesiediaan Menerima (WTA) Sebagai Proksi Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*.

Hermawan. Yudi, dkk. (2016). Keberhasilan Kelompok Tani dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, *Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan Institut Pertanian Malang*, Vol.1, No.1.

Mahardika, A., Mulyani, H.S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Adminitrasi Publik dan Kebijakan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara*. Vol.1.

Menteri Kehutanan. (2000). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Nugroho, H. (2020). Memperkokoh Keterkaitan Ketahanan Pangan, Energi dan Air (Food-Energy-Water Nexus) dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia. *Artikel Bappenas Working Papers*. Volume III No.2. Hal 239.

Prayoga, M.B.R., Fatmah, Harsoyo, B. (2023). Ketahanan Air Indonesia dalam Perspektif Ilmu Lingkungan dan Paradigma Nexus Pangan-Energi-Air Berkelanjutan, *Jurnal Ilmu Lingkungan UNDIP*, Vol 21, Issue 2.

LP2M Universitas Medan Area. (2023). Diakses pada tanggal 28 November 2023, dari <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/12/analisis-deskriptif-definisi-dan-tips-untuk-peneliti/>

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 39/Menhut-I/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Simon. Hasanu. (2010). *Dinamika Hutan Rakyat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Rangkuti, Freddy. (2008). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Wulandari. Christine. (2011). *Agroforestry: Kesejahteraan Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Alam*. LPPM Universitas Lampung.